

**SINERGITAS TNI ANGKATAN LAUT  
DALAM PEMBERDAYAAN WILAYAH PERTAHANAN LAUT  
MELALUI PENINGKATAN KESADARAN BELA NEGARA  
(STUDI DI KELURAHAN TANJUNG SENGGUANG PULAU BATAM)**

**INDONESIAN NAVY SYNERGISM  
TO EMPOWER THE SEA AREA OF DEFENSE  
THROUGH ENHANCEMENT IN STATE DEFENSE AWARENESS  
(Case Study in Tanjung Sengkuang, Batam Island)**

Putu Juli Adnyana<sup>1</sup>  
(bendesamas123@gmail.com)

**Abstrak** - Penelitian ini dilatarbelakangi oleh peran Pangkalan TNI AL dalam pemberdayaan wilayah pertahanan laut menghadapi maraknya kegiatan ilegal di wilayah perairan yurisdiksi nasional, khususnya perairan Tanjung Sengkuang Pulau Batam. Fenomena ini dapat dirumuskan bagaimana sinergitas Lanal Batam dengan *Stakeholders* dan masyarakat pesisir dalam pemberdayaan wilayah pertahanan laut melalui peningkatan kesadaran bela negara. Kemudian formulasi pemberdayaan masyarakat pesisir yang dapat dikembangkan oleh Lanal Batam melalui peningkatan kesadaran bela negara. Penelitian ini bersifat kualitatif dengan desain deskriptif dengan teknik pengumpulan data wawancara, observasi dan studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa belum ada sinergitas antara Lanal Batam dengan *Stakeholders* dalam pemberdayaan wilayah pertahanan laut terhadap masyarakat pesisir di Kelurahan Tanjung Sengkuang. Program pemberdayaan masyarakat pesisir yang dilaksanakan masih bersifat sektoral oleh masing-masing instansi terkait. Faktor kendala lainnya, kurangnya kemampuan sumber daya manusia sebagai aparat pembina peningkatan kesadaran bela negara. Berdasarkan analisis data, sinergitas Lanal Batam dengan *Stakeholders* dan masyarakat pesisir Kelurahan Tanjung Sengkuang dapat lebih optimal, diperlukan formulasi pemberdayaan masyarakat pesisir, melalui optimalisasi peran Lanal Batam dalam berkomunikasi dan koordinasi yang efektif, serta pembentukan regulasi dari Pemerintah Daerah tentang peningkatan kesadaran bela negara.

**Kata Kunci:** Sinergitas, Pemberdayaan, Bela Negara

**Abstract** - This research is focused on Indonesian Naval Base role in empowering the sea area of defense which notorious for the illegal activities inside the territorial sea area of Indonesia's national jurisdiction, particularly in the Tanjung Sengkuang waters, Batam Island. From the phenomenon above, the research question is how the synergism of Lanal Batam with stakeholders and seaside communities in order to empower the sea area of defense through raising the awareness to defend the country. And then, the formulation to empower the sea area of defense and could be developed by the Batam Naval Base through the enhancement of State Defense Awareness. This research methodology is qualitative descriptive design and using interview, observation and literature technique collection. The research outcome showed that there is no synergy between the Batam Naval Base with the stakeholders that

---

<sup>1</sup> Putu Juli Adnyana, Mahasiswa Fakultas Strategi Pertahanan, Program Studi Strategi Perang Semesta, Universitas Pertahanan Indonesia, Sentul, 2016.

related to empower the Tanjung Sengkuang seaside communities in the sea area of defense. The program to empower seaside communities is still divided by the agencies involved. Another limiting factor is the lack of capacity in human resources as officers to educate about defend the country awareness. Based on data analysis, the synergy between Lanal Batam, related stakeholders, and seaside communities of Tanjung Sengkuang village can be optimized by formulation of seaside community empowerment, through the optimization of the role of the Batam Naval Base in effective communication and coordination, also the establishment of local government regulation on the defend the country awareness.

**Keywords:** Synergy, Empowerment, State Defense.

## Pendahuluan

Indonesia sebagai negara yang wilayahnya berupa kepulauan, memiliki nilai lebih pada potensi sumber daya alam yang harus dioptimalkan<sup>2</sup>. Bagi Indonesia, posisi di titik silang mempunyai arti penting, terutama dalam bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, dan militer. Hal ini memberikan keuntungan besar terhadap pertumbuhan dan perkembangan pembangunan di Indonesia, sekaligus juga mengandung potensi ancaman yang luas, baik secara militer maupun nonmiliter terhadap keamanan nasional, khususnya pada jalur transportasi (*Sea Lane of Transportation / SLOT*) dan jalur komunikasi (*Sea Lane of Communication / SLOC*) di Selat Malaka, yang merupakan jalur pelayaran dan perdagangan internasional, digunakan oleh

negara-negara di dunia dengan segala kepentingannya.

Potensi ancaman digolongkan pada jenis, sumber dan aktor pelaku. Berdasarkan jenisnya, maka ancaman pertahanan negara dapat dikategorikan dalam ancaman militer dan nonmiliter. Apabila dilihat dari sumbernya, maka ancaman yang dihadapi Indonesia cenderung berasal dari luar negeri, serta yang muncul dari dalam negeri, namun sering dipengaruhi oleh pihak luar/asing. Sedangkan ancaman berdasarkan aktor, dilakukan oleh aktor negara maupun aktor bukan negara. Ancaman tersebut secara sistematis akan dapat mengancam kedaulatan negara, dan keutuhan wilayah negara, serta keselamatan segenap bangsa<sup>3</sup>.

Sebagaimana diketahui bahwa ancaman nonmiliter yang berdimensi

---

<sup>2</sup> Wahyono, S.K., *Indonesia Negara Maritim*, (Jakarta: IKAPI, 2007), hlm. 1.

---

<sup>3</sup> Kementerian Pertahanan RI, *Doktrin Pertahanan Negara*, (Jakarta: Kemhan RI, 2014), hlm. 26.

ekonomi dan sosial telah banyak menimbulkan permasalahan, diantaranya terkait dengan tindak kegiatan ilegal, berupa tindakan penyelundupan dan tindakan kejahatan di laut, yang membutuhkan kecermatan dan ketegasan dalam penanganannya. Wilayah perairan Pulau Batam merupakan salah satu tempat maraknya kejadian tindak kegiatan ilegal, berupa tindakan kejahatan dan tindakan penyelundupan. Oleh sebab itu, peran Lanal Batam yang berada di Pulau Batam sebagai pulau terluar dan terbesar di Provinsi Kepulauan Riau, menjadi penting dalam upaya pemberdayaan wilayah pertahanan laut<sup>4</sup>, karena lokasinya berbatasan langsung dengan negara lain. Pada tatanan geografis, perbatasan sebelah utara, Selat Singapura; sebelah selatan, Kabupaten Lingga (Pulau Lingga); sebelah barat, Kabupaten Karimun (Pulau Karimun); dan sebelah timur, Pulau Bintan dengan ibukota Tanjung Pinang<sup>5</sup>.

Permasalahan menonjol yang terjadi di wilayah Batam, antara lain; maraknya kegiatan ilegal yang dilakukan dengan

menggunakan beberapa modus operandi<sup>6</sup>, yakni penyelundupan orang (TKI), penyelundupan narkoba, maupun penyelundupan dan peredaran barang-barang kebutuhan masyarakat berupa pakaian bekas maupun makanan berasal dari Singapura, serta dari negara-negara lain melalui Malaysia. Hal ini berdampak dan berpengaruh terhadap gangguan keamanan maupun perkembangan perekonomian daerah. Selat Singapura merupakan salah satu jalur laut terpadat di dunia, sangat berpotensi terjadinya tindak kejahatan di laut seperti pembajakan kapal dan perompakan di laut, serta *transnational crime* lainnya.

Beberapa kasus kegiatan ilegal yang telah ditangani oleh Pangkalan TNI AL Batam, yakni tindak penyelundupan, perompakan dan pencurian di atas kapal niaga. Hingga kasus penyelundupan yang menonjol sampai melawan aparat keamanan, antara lain: (1) Kejadian pada bulan November 2014, telah ditangkap oleh Tim Gabungan (Bea Cukai Tanjung Balai Karimun bersama TNI AL), sebuah KM. Jembar Hati bermuatan rotan 178.000 kg, yang akan diselundupkan ke Malaysia, di

---

<sup>4</sup> Himpunan Peraturan Perundang-undangan, UU No.34 Tahun 2004 tentang TNI, Pasal 9 (e), (Bandung: FOKUSMEDIA, 2004), hlm. 10.

<sup>5</sup> Batam dalam Data 2015, hlm. 10.

---

<sup>6</sup> *website*, [www.batamnews.co.id/berita-4668-itpolair-gagalkan-penyelundupan-sol](http://www.batamnews.co.id/berita-4668-itpolair-gagalkan-penyelundupan-sol).

Perairan Tanjung Berakit Batam; (2) Kejadian pada bulan Oktober 2015 di Perairan Tanjung Sengkuang Batam, Kapal Patroli Bea Cukai telah menangkap dan memeriksa KM Surya Pratama, bermuatan berupa pakaian bekas (*ballpress*) dan sembako yang diangkut dari Singapura tujuan Kelurahan pesisir Tanjung Sengkuang Kecamatan Batu Ampar Batam<sup>7</sup>.

Kegiatan penyelundupan barang yang dilakukan, antara lain: jenis barang bekas (*second*) dan pakaian bekas (*ballpress*). Adapun modus operandinya; barang dimuat di pelabuhan Jurong Singapura, kemudian dengan menggunakan angkutan kapal kayu dilakukan oleh kelompok masyarakat tertentu atau nelayan, dibawa menuju Tembilahan daerah Kepulauan Riau dan ke wilayah Pulau Batam sekitarnya. Untuk penyelundupan jenis rokok justru sebaliknya, modusnya membawa rokok berasal dari Indonesia menuju pelabuhan Batam, selanjutnya dibawa menuju Malaysia dan Singapura dengan menggunakan sarana speed boat. Penyelundupan pasir laut dilakukan dengan menggunakan kontainer dari wilayah Pulau

---

<sup>7</sup> Pangkalan TNI AL Batam, *Laporan Bulanan*, 2014-2015.

Batam sekitarnya dikirim menuju Singapura<sup>8</sup>.

Mengantisipasi kegiatan ilegal yang dilakukan oleh masyarakat pesisir Kelurahan Tanjung Sengkuang, diperlukan adanya program pembinaan dan pemberdayaan masyarakat melalui peningkatan kesadaran bela negara untuk menumbuhkan semangat dan kebanggaan nasional, serta pemahaman tentang kesadaran berbangsa dalam kehidupan sehari-hari. Bela negara yang digelorkan terhadap masyarakat pesisir Tanjung Sengkuang, diharapkan mampu menumbuhkan semangat dan motivasi bagi seluruh warga masyarakat untuk mencintai tanah air Indonesia, yang dilandasi oleh nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945. Tanpa adanya kesadaran bela negara yang tinggi dari seluruh masyarakat, maka bangsa Indonesia akan menjadi rapuh dan goyah oleh hempasan arus globalisasi, pasar bebas dan perdagangan bebas<sup>9</sup>.

Dengan semakin berkembang dan semakin maraknya arus globalisasi, telah membuat lalai sebagian bangsa Indonesia akan kesadaran untuk melindungi dan

---

<sup>8</sup> Pangkalan TNI AL Batam, *Laporan Bulanan*, 2015.

<sup>9</sup> Agus Subagyo, *Bela Negara, Peluang dan Tantangan di Era Globalisasi*, (Yogyakarta: GRAHA ILMU, 2015), hlm. 64-65.

membela negaranya dari segala bentuk ancaman yang terjadi. Pemerintah dalam hal ini Kementerian Pertahanan oleh Kepala Badan Pendidikan dan Latihan, mengatakan bahwa program bela negara yang diselenggarakan lembaganya merupakan implementasi dari kebijakan umum Presiden RI Joko Widodo, yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 97 tahun 2015, tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara<sup>10</sup>.

Sinergitas Pangkalan TNI AL Batam dengan *Stakeholders* dalam meningkatkan kesadaran bela negara terhadap masyarakat pesisir Kelurahan Tanjung Sengkuang hendaknya dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan, melalui kegiatan pemberdayaan masyarakat pesisir, yang nantinya menjadi bagian sebagai kekuatan pendukung dalam upaya strategi sistem pertahanan semesta. Dawilhanla oleh TNI AL, dalam hal ini dilakukan oleh fungsi Dinas Potensi Maritim (Dispotmar) melalui Pangkalan TNI AL Batam, hendaknya berperan aktif membantu Pemerintah Daerah setempat membangun dan mewujudkan pertahanan

---

<sup>10</sup> [www.cnnindonesia.com/.../kemhan-program-bela-negara-sesuai-kebijakan-presiden/](http://www.cnnindonesia.com/.../kemhan-program-bela-negara-sesuai-kebijakan-presiden/)

laut yang tangguh dan handal<sup>11</sup>. Melalui Pangkalan TNI AL Batam sebagai komponen utama pertahanan di laut, mampu secara mandiri dan bersinergi dengan komponen kekuatan lainnya menyiapkan pertahanan negara di laut, di wilayah pesisir Kelurahan Tanjung Sengkuang Pulau Batam, sehingga dapat mendukung terwujudnya kedaulatan wilayah pertahanan dan keamanan daerah yang semakin baik, guna tercapainya ketahanan nasional.

### **Metodologi**

Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif, merupakan metode penelitian berlandaskan kepada filsafat postpositivisme, digunakan dalam penelitian pada kondisi obyek yang bersifat alamiha di Kelurahan Tanjung Sengkuang Kota Batam, dimana Peneliti merupakan instrumen kunci. Analisis data lebih bersifat induktif/kualitatif, serta hasil penelitian kualitatif lebih menekankan pada makna daripada generalisasi<sup>12</sup>.

---

<sup>11</sup> Mabel, Buku Petunjuk Pelaksanaan; *Pemberdayaan Wilayah Pertahanan Laut* (PUM-13.101), 2015.

<sup>12</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: CV. ALFABETA, 2014), hlm. 9.

Pengumpulan data dilakukan dari berbagai sumber, menggunakan sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer, sumber yang langsung memberikan data kepada Peneliti, yaitu para pejabat pembuat keputusan (*stakeholders*) di instansi terkait Kota Batam, maupun pejabat pemangku kewenangan serta tokoh masyarakat yang berpengaruh di lingkungan tempat penelitian di Kelurahan Tanjung Sengkuang. Sedangkan sumber sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada Peneliti, lewat orang lain atau lewat studi dokumen<sup>13</sup>.

Secara spesifik dalam pemilihan subyek penelitian, yaitu beberapa pejabat yang berperan penting, antara lain: Dirjen Pothan Kemhan RI, Kadispotmar Mabesal dan pejabat jajaran Koarmabar, serta para pejabat daerah dan pemangku kepentingan di Kelurahan Tanjung Sengkuang yang memiliki pengetahuan luas tentang daerah penelitian, dan bisa diajak bekerjasama untuk kegiatan penelitian yang dilakukan<sup>14</sup>. Penentuan subyek maupun informan penelitian yang menggunakan

pertimbangan *snowball sampling* berkembang mengikuti informasi atau data yang diperlukan. Sehingga memungkinkan melibatkan pihak di luar pejabat pertahanan dan keamanan serta pemerintah daerah, yang dipandang mengerti dan memahami hal-hal yang sedang diteliti, yaitu para tokoh atau orang-orang yang berperan terhadap masyarakat pesisir Kelurahan Tanjung Sengkuang Pulau Batam.

#### **Pembahasan**

Penelitian yang dilaksanakan di Kelurahan Tanjung Sengkuang Kecamatan Batu Ampar Kota Batam, yakni menganalisa sinergitas Pangkalan TNI AL Batam (Lanal Batam) dalam pemberdayaan wilayah pertahanan laut, melalui peningkatan kesadaran bela negara terhadap masyarakat pesisir. Hasil penelitian yang telah dilaksanakan menunjukkan bahwa sinergitas yang dilakukan oleh Lanal Batam dengan *Stakeholders* terhadap masyarakat pesisir di Kelurahan Tanjung Sengkuang sampai dengan saat ini, belum berjalan dengan optimal. Implementasi di lapangan antar *Stakeholders* belum ada perencanaan dan belum terkonsep dengan baik melalui kerjasama yang solid dengan instansi terkait, karena masih bersifat sektoral.

---

<sup>13</sup> Ibid, hlm. 224-225.

<sup>14</sup> Moleong, L.J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007).

Kemampuan sumber daya manusia yang dimiliki oleh Lanal Batam masih terbatas pemahamannya mengenai konsep *dawilhanla*, dan pemahamannya bagaimana melakukan pembinaan dalam meningkatkan kesadaran bela negara terhadap masyarakat pesisir Tanjung Sengkuang. Hal ini ditunjukkan dengan banyak terjadinya pelanggaran kedaulatan wilayah berupa kegiatan ilegal dan tindakan penyelundupan di perairan perbatasan negara, yaitu di perairan Pulau Batam pada umumnya, dan tindakan ilegal di Kelurahan Tanjung Sengkuang khususnya. Masalah ini dibenarkan melalui penjelasan oleh Kepala Wilayah Kelurahan (Lurah) Tanjung Sengkuang, dan Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Tanjung Sengkuang, mengenai adanya perdagangan barang bekas (ilegal) yang berasal dari Singapura, memang terjadi di wilayahnya<sup>15</sup>.

Belum optimalnya pemahaman warga masyarakat Kelurahan Tanjung Sengkuang terhadap nilai-nilai dan implementasi tentang bela negara, sehingga sering terjadi kegiatan ilegal dan tindakan

---

<sup>15</sup> Hasil wawancara, Peneliti dengan narasumber pada tanggal 10 Agustus 2016 di Kelurahan Tanjung Sengkuang.

penyelundupan secara masif, melanggar aturan dan ketentuan hukum yang berlaku. Kita pahami bahwa nilai-nilai pertahanan dan keamanan, memiliki nilai-nilai yang bersifat luhur bagi keberadaan dan peradaban suatu bangsa. Setiap warga negara, baik seorang individu maupun masyarakat serta organisasi memiliki suatu nilai, yaitu nilai instrinsik maupun nilai ekstrinsik yang dapat memberikan kontribusi terhadap kinerja organisasi pertahanan yang solid dan dipercaya, serta dibanggakan dalam mengawal eksistensi, keutuhan, dan kedaulatan negara<sup>16</sup>.

Memahami penjelasan yang tercantum dalam Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara; menempatkan lembaga pemerintah di luar bidang pertahanan sebagai unsur utama dalam menghadapi ancaman nonmiliter. Oleh karenanya, kerjasama yang solid dan saling percaya antar *Stakeholders* menjadi penting untuk dilaksanakan. Implementasi sinergitas Lanal Batam dengan *Stakeholders* dalam pemberdayaan wilayah pertahanan laut melalui peningkatan kesadaran bela negara, terhadap

---

<sup>16</sup> Supriyatno, M. *Tentang Ilmu Pertahanan*. (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2014). Hlm. 341.

masyarakat pesisir di Kelurahan Tanjung Sengkuang Kota Batam, diharapkan dapat terlaksana dengan baik. Sebagaimana pemahaman penjelasan dalam teori Sinergi menurut James A. F. Stoner, sinergi adalah hubungan antara dua belah pihak atau lebih yang dapat menghasilkan tingkatan komunikasi, dihadapkan pada elemen kerjasama dan saling percaya<sup>17</sup>.

Berdasarkan pola hubungan kerja yang mungkin terjadi, akan menghasilkan tiga sifat komunikasi dalam kerjasama tersebut. *Pertama; Defensive*, yaitu tingkat kerja sama dan kepercayaan rendah akan mengakibatkan pola komunikasi yang bersifat pasif defensif. Pada tingkatan komunikasi yang bersifat pasif defensif, yaitu tidak adanya komunikasi dan hubungan antara pihak-pihak terkait tidak menghasilkan suatu energi kepedulian kerjasama yang optimal, dan koordinasi dinamis yang berdampak terhadap kemajuan dalam suatu organisasi atau wilayah. Hal ini ditunjukkan dalam pelaksanaan tugas oleh Komandan Pos Pengamat (Danposmat) yang berlokasi di Kelurahan Tanjung Sengkuang. Menurut penjelasan dalam wawancara yang

---

<sup>17</sup> Stoner, James, A.F. *Manajemen*. (Jakarta: Erlangga).

dilakukan oleh Peneliti dengan Danposmat<sup>18</sup>, bahwa Danposmat belum pernah berkomunikasi dengan petugas Ketua LPM yang bekerja dan bertanggungjawab dalam pemberdayaan masyarakat setempat. Danposmat juga belum pernah berkomunikasi dengan Ketua Rukun Nelayan yang mengkoordinir dan membina para nelayan di Kelurahan Tanjung Sengkuang. Ini menunjukkan bahwa kerjasama dan kepercayaan antar Danposmat dengan petugas terkait sangat rendah dan bersifat pasif, sehingga tidak menimbulkan kepedulian dan kerjasama yang optimal.

Demikian pula halnya dengan kinerja pejabat Paspotmar Lanal Batam yang bertugas membantu Danlanal Batam dalam dawilhanla di Kelurahan Tanjung Sengkuang. Sebagaimana hasil wawancara Peneliti dengan Paspotmar<sup>19</sup>, bahwa Paspotmar hanya berkomunikasi dengan Lurah Tanjung Sengkuang sebatas kegiatan gotong-royong dan bersih-bersih lingkungan. Secara khusus belum pernah melakukan komunikasi dan koordinasi dengan aparat terkait di Kelurahan Tanjung

---

<sup>18</sup> Hasil wawancara, Peneliti dengan narasumber pada tanggal 15 Agustus 2016 di Tanjung Sengkuang.

<sup>19</sup> Hasil wawancara, Peneliti dengan narasumber pada tanggal 15 Agustus 2016 di Lanal Batam.



Sengkuang, yang mengarah kepada pembinaan potensi maritim dalam dawilhanla. Masing-masing pihak antara aparat / petugas Komandan Posmat dan pejabat Paspotmar dengan tokoh masyarakat dan pejabat lembaga pemberdayaan masyarakat setempat, belum pernah terjalin adanya koordinasi sesuai pelaksanaan tugas pokok.

Oleh karenanya, tingkat kerjasama dan kepercayaan menjadi rendah sehingga pencapaian tugas pokok dan fungsi Lanal Batam dalam dawilhanla melalui peningkatan kesadaran bela negara belum tercapai dengan optimal. Pola komunikasi yang bersifat defensive ini harus dihindari oleh para pejabat terkait dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dawilhanla. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), Sukamto, dan Ketua Rukun Nelayan Tanjung Sengkuang, Sdr. Solichin, bahwa Komandan Posmat Tanjung Sengkuang belum pernah berkomunikasi dan berkoordinasi dengan para nelayan Tanjung Sengkuang yang jumlahnya hanya sekitar 41 (empat puluh satu) orang, terkait dengan penyelesaian permasalahan yang

erat hubungannya dengan para nelayan menangani masalah pencemaran laut karena pengerukan pasir dan lain-lain<sup>20</sup>. Hal ini dipertegas sendiri oleh Danposmat yang memang tidak mengetahui jumlah nelayan yang ada di Tanjung Sengkuang, saat melakukan wawancara dengan Peneliti. Penjelasan dari Ketua LPM dan Ketua Rukun Nelayan mengenai kinerja Komandan Posmat, memberikan gambaran bahwa keberadaan Posmat TNI AL yang berlokasi di Kelurahan Tanjung Sengkuang belum bersinergi dengan petugas masyarakat terkait yang menangani pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kesadaran bela negara dengan masyarakat pesisir setempat.

*Kedua; Respectful*, dengan adanya kerjasama dan saling mempercayai akan menghasilkan pola komunikasi yang bersifat kompromi dan saling menghargai. Hubungan komunikasi ini masih bersifat sektoral yang dilakukan oleh masing-masing pemangku kepentingan, dan belum terjalin adanya koordinasi yang intensif untuk dapat menghasilkan keberhasilan bersama. Peran ini memang dilakukan oleh

---

<sup>20</sup> Hasil wawancara, Peneliti dengan narasumber pada tanggal 10 & 11 Agustus 2016 di Tanjung Sengkuang.

Komandan Posmat Tanjung Sengkuang kepada instansi lain, seperti Babinsa dan Babinkamtibmas dari Kepolisian. Tetapi pelaksanaan koordinasinya hanya sebatas masalah situasi keamanan yang bersifat umum, belum menyentuh substansi dari permasalahan tugas pokok dan fungsi terkait dengan pemberdayaan wilayah pertahanan laut melalui peningkatan kesadaran bela negara terhadap masyarakat pesisir Kelurahan Tanjung Sengkuang. Sebagaimana hasil wawancara dengan Danposmat, bahwa komunikasi yang dilakukan kalau ada permasalahan apa yang terjadi di masyarakat setempat. Kalau mengadakan pengarahan bersama-sama dengan aparat terkait belum pernah dilaksanakan. Menurut Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), Sukamto, justru yang memberikan pengarahan tentang kelautan dari pihak Polisi Perairan (Polair)<sup>21</sup>. Pemahaman Komandan Posmat Tanjung Sengkuang tentang pelaksanaan tugas pokoknya belum berjalan dengan baik, karena yang bersangkutan juga merangkap jabatan sebagai Bintara Utama di Detasemen Markas Lanal Batam. Sehingga perannya

sebagai Danposmat tidak terkonsentrasi penuh di Posmat Tanjung Sengkuang.

*Ketiga; Sinergistic*, pengertian sinergi adalah membangun dan memastikan hubungan kerjasama internal yang produktif serta kemitraan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan, untuk menghasilkan karya yang bermanfaat dan berkualitas. Tujuan sinergi adalah mempengaruhi perilaku orang secara individu maupun kelompok dan masyarakat yang lebih luas untuk saling berhubungan, melalui dialog dengan semua golongan, dimana persepsi, sikap dan opininya penting terhadap suatu pencapaian dan kesuksesan. Dengan kerjasama yang tinggi dan saling mempercayai, akan menghasilkan pola komunikasi dan koordinasi yang bersifat sinergis. Artinya kerjasama yang terjalin akan menghasilkan keluaran yang lebih besar dari penjumlahan hasil keluaran masing-masing pihak. Pola komunikasi dan koordinasi yang bersinergi inilah yang dibutuhkan oleh Lanal Batam beserta jajaran di bawahnya dalam upaya melakukan tindakan penyampaian informasi antar individu dan kelompok masyarakat, sehingga tercapai kesamaan

---

<sup>21</sup> Hasil wawancara, Peneliti dengan narasumber pada tanggal 11 Agustus 2016 di Tanjung Sengkuang.

pemahaman sebagai proses pengintegrasian kegiatan dan tujuan pemberdayaan masyarakat pesisir, melalui peningkatan kesadaran bela negara di Kelurahan Tanjung Sengkuang.

Proses penyelenggaraan *dawilhanla* oleh Lanal Batam dan *Stakeholders* yang bersifat sinergistik ini akan memberikan hasil yang lebih optimal terhadap masyarakat pesisir di Kelurahan Tanjung Sengkuang, apabila dalam implementasinya didukung oleh Peraturan Walikota yang menguatkan pelaksanaannya di lapangan. Sampai dengan saat ini belum ada regulasi daerah yang mendukung sinergitas antar *stakeholders* dalam pembinaan kesadaran bela negara dengan masyarakat sebagai bentuk penguatan dalam aspek legal formal.

Setelah adanya sinergitas antar Lanal Batam dengan *Stakeholders*, selanjutnya bagaimana Lanal Batam dapat memberdayakan masyarakat pesisir melalui peningkatan kesadaran bela negara, sehingga memiliki kemampuan daya tangkal yang tinggi dalam pertahanan wilayah laut. Menurut Ambar, S. bahwa proses pemberdayaan masyarakat akan berlangsung secara bertahap, meliputi:

tahap penyadaran dan pembentukan perilaku menuju perilaku sadar dan peduli, tahap transformasi kemampuan dan tahap peningkatan intelektual<sup>22</sup>. Konsep penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat melalui proses penyadaran dan pembentukan perilaku masyarakat telah dilaksanakan oleh Kementerian Pertahanan, Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan. Dalam hal ini dilaksanakan oleh Direktorat Bela Negara melalui penyelenggaraan pembinaan kesadaran bela negara, yang diawali dengan Pembentukan Kader Bela Negara.

Pembinaan kesadaran bela negara merupakan salah satu bagian dari pembentukan karakter bangsa bagi seluruh warga negara Indonesia. Pembentukan karakter bangsa ini menjadi program dari Kementerian Pertahanan menindaklanjuti konsep gerakan revolusi mental yang telah dicanangkan oleh Presiden Republik Indonesia. Dalam program pembentukan karakter bangsa melalui pembinaan kesadaran bela negara, yang diarahkan dan ditanamkan kepada masyarakat adalah pemahaman tentang 5 (lima) nilai-nilai yang

---

<sup>22</sup> Ambar, Teguh, S. *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan*. (Jakarta: Gava Media, 2004), hlm. 82-83.

harus dihayati dan diimplementasikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, yaitu: (1) cinta tanah air; (2) kesadaran berbangsa dan bernegara; (3) keyakinan pada Pancasila sebagai ideologi negara; (4) kerelaan berkorban untuk bangsa dan negara; dan (5) memiliki kemampuan awal bela negara<sup>23</sup>.

Melalui program Pembentukan Kader Bela Negara di 45 (empat puluh lima) kabupaten/kota seluruh Indonesia tahun 2015 oleh Direktorat Bela Negara, Ditjen Pothan Kemhan<sup>24</sup>, merupakan bentuk transformasi kemampuan atau pengkapasitasan pemahaman bela negara terhadap warga negara Indonesia, agar mempunyai kemampuan daya tangkal terhadap ancaman perilaku, menolak tindak kegiatan negatif yang melanggar dan mengabaikan hukum positif, yang muaranya akan melemahkan ketahanan nasional. Dalam proses transformasi kemampuan (pengkapasitasan) melalui Pembentukan Kader Bela Negara, masyarakat/warga negara akan diberikan

pengetahuan untuk meningkatkan intelektualitas (pendayaan) mengenai nilai-nilai kecintaan terhadap tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara, keyakinan kepada Pancasila dan kerelaan berkorban untuk nusa bangsa dalam kebhinekaan, yang dilakukan dalam kehidupan dan kegiatan sehari-hari di lingkungan masyarakat dimanapun berada, khususnya di Kelurahan Tanjung Sengkuang.

Sinergitas Lanal Batam dengan *Stakeholders* dalam hal ini Pemerintah Kota Batam, dalam program pemberdayaan masyarakat pesisir melalui peningkatan kesadaran bela negara di Kelurahan Tanjung Sengkuang belum berjalan sesuai harapan, karena masih bersifat sektoral. Pembinaan dan pelatihan bela negara terhadap masyarakat pesisir Kelurahan Tanjung Sengkuang belum tersentuh. Oleh karena itu, program penyelenggaraan pelatihan bela negara di Kota Batam pada kesempatan berikutnya, Lanal Batam dan *Stakeholders*, perlu merencanakan dan melaksanakan melalui kerjasama yang solid dan bersinergi, dengan melibatkan perwakilan seluruh unsur masyarakat yang ada, sebagai Kader Bela Negara. Bahkan

---

<sup>23</sup> Kementerian Pertahanan RI. *Tataran Dasar Bela Negara*. (Jakarta: Ditjen Pothan, 2014), hlm. 6.

<sup>24</sup> Kementerian Pertahanan RI. *Rencana Garis Besar Pembentukan Kader Pembina Bela Negara di 45 Kabupaten/Kota Seluruh Indonesia Tahun 2015*. (Jakarta: Direktorat Bela Negara, 2015).

secara khusus dapat dilaksanakan di Kelurahan Tanjung Sengkuang bersama-sama dengan kelurahan lainnya.

Keikutsertaan seluruh komponen bangsa melalui sinergitas Lanal Batam dengan *Stakeholders* dalam pemberdayaan masyarakat pesisir merupakan bagian dari Sistem Pertahanan Semesta (Sishanta). Sishanta sangat erat kaitannya dengan bagaimana pemerintah dapat mengelola kedaulatan wilayah teritorialnya dengan baik. Prinsip penguasaan atas wilayahnya, yaitu prinsip yang digunakan untuk menentukan suatu wilayah menjadi milik suatu Negara, yaitu *Prinsip Efektifitas*. Menurut prinsip ini bahwa kepemilikan Negara atas suatu wilayah ditentukan oleh berlakunya secara efektif peraturan hukum nasional di wilayah tersebut. Disamping prinsip ini, Martin Dixon memperkenalkan prinsip lain, yaitu: adanya kontrol dari Negara terhadap suatu wilayah, dan adanya pelaksanaan fungsi Negara di wilayah tersebut secara damai. Didasari oleh prinsip tersebut, bahwa adanya kegiatan ilegal dan tindakan penyelundupan secara masif di wilayah Batam menandakan bahwa fungsi kontrol dari negara terhadap wilayah tersebut masih lemah. Oleh karenanya,

melalui sinergitas Lanal Batam dengan *Stakeholders* dan didukung oleh masyarakat pesisir Kelurahan Tanjung Sengkuang yang solid dan memiliki kesadaran bela negara yang tinggi, negara dalam hal ini aparat kewilayahan daerah akan mampu mewujudkan penguasaan atas kedaulatan wilayahnya terhadap ancaman nonmiliter berupa kegiatan ilegal dan tindakan penyelundupan. Dengan demikian, ketahanan wilayah menjadi kuat dan berdampak terhadap penguatan ketahanan nasional, sehingga tujuan nasional dapat terwujud.

### **Kesimpulan**

Pemberdayaan wilayah pertahanan laut melalui peningkatan kesadaran bela negara oleh Lanal Batam dengan *Stakeholders* terhadap masyarakat pesisir Kelurahan Tanjung Sengkuang, belum bersinergi dan berjalan dengan baik. Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing instansi belum dilandasi dengan konsep komunikasi dan koordinasi yang sinergis dan dinamis, sehingga belum terjalin adanya kerjasama positif dan saling percaya, bermanfaat bagi warga masyarakat Kelurahan Tanjung Sengkuang. Komunikasi dan koordinasi yang terjalin selama ini, antara pelaksana

tugas dari Lanal Batam dengan instansi lain terkait dan masyarakat pesisir setempat, masih bersifat pasif defensif.

Program pemberdayaan wilayah yang dilaksanakan oleh Lanal Batam masih bersifat sektoral, dan implementasinya di lapangan belum terkonsep dengan baik. Pelaksana tugas Lanal Batam dalam hal ini Paspotmar dan Komandan Pos Pengamat di Tanjung Sengkuang belum melakukan upaya kemitraan secara intensif dengan aparat terkait yang mempunyai kewenangan, yaitu: Kepala Wilayah Kelurahan Tanjung Sengkuang, Babinsa, Babinkamtibmas, Ketua LPM dan Ketua Rukun Nelayan serta Tokoh Masyarakat setempat, sehingga antara masing-masing pemangku kewenangan dalam penyelenggaraan program pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Tanjung Sengkuang, masih mengedepankan ego sektoral.

Kemampuan sumber daya manusia oleh Lanal Batam masih terbatas, karena pembekalan dan pengarahan terhadap personel atau petugas yang diberikan tanggungjawab dalam pelaksanaan tugas pokok belum optimal. Aparat atau petugas, sebelum melaksanakan tugas kedinasan di

lapangan, seharusnya memperoleh pendayaan intelektual dan pengkapasitasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang diemban. Sehingga mampu menjalankan tugas pokok dan fungsinya, untuk melakukan pemberdayaan terhadap masyarakat pesisir yang menjadi mitranya.

Belum ada regulasi dari Pemerintah Daerah berupa Peraturan Walikota yang dapat mewedahi sinergitas *Stakeholders* dalam pemberdayaan kepada warga masyarakat Batam pada umumnya dan warga masyarakat pesisir khususnya, melalui peningkatan kesadaran bela negara. Sehingga dengan adanya regulasi, diharapkan dapat lebih memperkokoh sinergitas dan soliditas antar pemangku kewenangan. Dukungan regulasi dari Pemerintah Daerah berupa peraturan Walikota ini penting sebagai landasan formal, guna memberikan penguatan dari aspek hukum, sehingga tidak ada keraguan dalam pelaksanaan tugas bersama di lapangan.

Formulasi pemberdayaan masyarakat pesisir yang dapat dikembangkan oleh Lanal Batam melalui peningkatan kesadaran bela negara di lingkungan

Kelurahan Tanjung Sengkuang, antara lain:

(1) Lanal Batam bersama-sama dengan komponen bangsa lainnya, berada pada strata dan kewajiban yang sama, tidak menempatkan diri sebagai komponen yang paling dibutuhkan dalam sistem pertahanan negara, sehingga menyebabkan terjadi adanya batasan/gap dalam dawilhanla; (2) Dalam penyelenggaraan dawilhanla mengutamakan keterpaduan lintas sektoral melalui perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan, sehingga hasilnya dapat lebih optimal; (3) Penyelenggaraan dawilhanla mengutamakan integrasi dan mendukung musyawarah, mempunyai kesatuan sasaran dan kesatuan tujuan dengan pemerintah atau instansi terkait dan masyarakat pesisir. Selaras dengan program pembinaan kesadaran bela negara yang diselenggarakan oleh Kementerian Pertahanan Republik Indonesia melalui Pembentukan Kader Bela Negara, secara terpadu, simultan dan berlanjut; (4) Penyelenggaraan dawilhanla dilaksanakan melalui pembinaan potensi maritim, berupa: Bakti TNI AL; Pembinaan Ketahanan Wilayah; dan Komunikasi Sosial.

### Daftar Pustaka

- Agus Subagyo, *Bela Negara, Peluang dan Tantangan di Era Globalisasi*, (Yogyakarta: GRAHA ILMU, 2015).
- Ambar, Teguh, S. *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan*. (Jakarta: Gava Media, 2004).
- Dixon, Martin and McCorquodale, Robert, *Cases and Materials on International Law* (4th ed, 2003).
- Himpunan Peraturan Perundang-undangan, *UU No.34 Tahun 2004 tentang TNI*, (Bandung: FOKUSMEDIA, 2004).
- Kementerian Pertahanan RI. *Tataran Dasar Bela Negara*. (Jakarta: Ditjen Pothan, 2014).
- Kementerian Pertahanan RI. *Rencana Garis Besar Pembentukan Kader Pembina Bela Negara di 45 Kabupaten/Kota Seluruh Indonesia Tahun 2015*. (Jakarta: Direktorat Bela Negara, 2015).
- Kementerian Pertahanan RI, *Doktrin Pertahanan Negara*, (Jakarta: Kemhan RI, 2014).
- Mabesal, Buku Petunjuk Pelaksanaan; *Pemberdayaan Wilayah Pertahanan Laut* (PUM-13.101), 2015.
- Moleong, L.J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007).
- Pemerintah Kota Batam, *Batam dalam Data 2015*.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: CV. ALFABETA, 2014).
- Supriyatno, M. *Tentang Ilmu Pertahanan*. (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2014).
- Stoner, James, A.F. *Manajemen*. (Jakarta: Erlangga).
- Wahyono, S.K., *Indonesia Negara Maritim*, (Jakarta: IKAPI, 2007).

website, [www.batamnews.co.id/berita-4668-itpolair-gagalkan-penyelundupan-sol](http://www.batamnews.co.id/berita-4668-itpolair-gagalkan-penyelundupan-sol).  
[www.cnnindonesia.com/.../kemhan-program-bela-negara-sesuai-kebijakan-presiden/](http://www.cnnindonesia.com/.../kemhan-program-bela-negara-sesuai-kebijakan-presiden/)